

DISERTASI

**KEKHUSUSAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH ACEH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH**



Diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam rangka memperoleh gelar Doktor Hukum

ZAINAL ABIDIN
NIM 1730112013

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024

**KEKHUSUSAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH ACEH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG PEMERINTAHAN ACEH**

(Zainal Abidin, 1730112013, Program Studi Doktor Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 364 halaman, 2024)

ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan Pilkada nasional, tidak sepenuhnya dapat diberlakukan bagi semua daerah. Oleh karena terdapat beberapa daerah berstatus desentralisasi asimetris memiliki perundang-undangan khusus mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satunya Provinsi Aceh memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di wilayah Aceh selain diatur khusus juga terdapat materi muatan khusus berbeda dengan daerah lainnya. Norma khusus maupun materi kekhususan dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di wilayah Aceh selalu dihadapkan pada perundang-undangan Pilkada nasional dan kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga terjadilah konflik norma baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga pelaksanaan norma kekhususan dalam Pilkada Aceh tidak memiliki kepastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ; (1) Bagaimana kekhususan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (2) Bagaimana implementasi norma kekhususan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (3) Bagaimana skema kekhususan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh dapat dikembangkan pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sumber data berupa studi pustaka atau data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier, serta mewawancarai responden untuk konfirmasi data. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa (1) kekhususan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh terletak pada aturannya yang khusus yaitu UUPA dan Qanun serta materi Pilkada yang khusus seperti partai lokal, penyelenggara, uji mampu baca Al-Qur'an, ambang batas dukungan calon perseorangan, ambang batas perolehan kursi atau suara partai dalam pencalonan dan pengadil sengketa hasil pemilihan (2) Dalam implementasi norma dan materi kekhususan telah terjadi konflik norma, antara norma kekhususan dengan norma perundang-undangan Pilkada nasional baik secara vertikal maupun horizontal. Konflik juga terjadi antara perundangan kekhususan dengan kebijakan Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (3) Semua norma dalam UUPA dan Qanun Pilkada Aceh merupakan norma kekhususan, serta Pilkada sudah menjadi rezim Pemilu sehingga terbentuk kerangka hukum baru Pilkada, untuk itu perlu sinkronisasi UUPA, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada dengan tetap menjaga eksistensi kekhususan Pilkada Aceh. Direkomendasikan perlunya reformulasi pelaksanaan sistem derogasi hukum di daerah simetris Aceh dan segera mengamandemen baik UUPA, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.

Kata Kunci: Kekhususan, Pilkada, Undang-Undang Pemerintahan Aceh

SPECIALTY OF THE ACEH REGIONAL HEAD ELECTION BASED ON LAW NUMBER 11 OF 2006 CONCERNING THE ACEH GOVERNMENT

(Zainal Abidin, 1730112013, Doctor of Law Program, Faculty of Law,
Andalas University, 364 pages, 2024)

ABSTRACT

National regional election laws and regulations cannot be fully applied to all regions because there are several regions with asymmetric decentralized status that have special legislation regulating the election of regional heads and deputy regional heads. One of them is that Aceh Province has Law Number 11 of 2006 concerning Aceh Government (UUPA) and Aceh Qanun Number 12 of 2016 concerning the Election of Governor/Deputy Governor, Regent/Deputy Regent, and Mayor/Deputy Mayor. Apart from being specifically regulated, regional head elections in the Aceh region also contain special content that is different from other regions. Specific norms and specific material in the election of Governor/Deputy Governor, Regent/Deputy Regent, and Mayor/Deputy Mayor in the Aceh region are always faced with national regional election legislation and government policies so that norm conflicts occur both vertically and horizontally, resulting in the implementation of norms. The specifics of the Aceh Regional Election do not have legal certainty. The problem formulation in this research is; (1) What is the specificity of the election of Governor/Deputy Governor, Regent/Deputy Regent, and Mayor/Deputy Mayor based on Law Number 11 of 2006 concerning the Aceh Government (2) How is the implementation of the norm for the specificity of the election of Governor/Deputy Governor, Regent/Deputy Regent and Mayor /Deputy Mayor (3) How can the specifics scheme of the election of Governor/Deputy Governor, Regent/Deputy Regent and Mayor/Deputy Mayor in Aceh be developed in the future. The research method used is the normative legal research method. Data sources in the form of literature studies or secondary data include primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as interviewing respondents to confirm the data. Based on the research results, it was found that (1) the specificity of the election of Governor/Deputy Governor, Regent/Deputy Regent, and Mayor/Deputy Mayor in Aceh lies in its special regulations, namely the UUPA and Qanun as well as special regional election materials such as local parties, organizers, literacy tests Al-Qur'an, the threshold for support for individual candidates, the threshold for obtaining seats or party votes in nominations, and adjudicating disputes over election results (2) In the implementation of norms and specific material, there has been a conflict of norms, between specific norms and the norms of national regional election legislation, both vertically and horizontally. Conflicts also occur between specific legislation and government policy and the General Election Commission (3) All norms in the UUPA and Qanun Pilkada Aceh are specific norms, and Pilkada has become an election regime so that a new legal framework for Pilkada is formed, for this reason, it is necessary to synchronize the UUPA, the Election Law and the Pilkada Law while maintaining the special existence of the Aceh Pilkada. It is recommended that there is a need to reformulate implementation of the derogation system in the symmetrical region of Aceh and immediately amend both the UUPA, the Election Law, and the Pilkada Law.

Keywords: Specificity, Pilkada, Government of Aceh

